



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



RENCANA AKSI

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

TA

. 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, bahwa kami dengan ridho-Nya dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Rencana Aksi Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Dalam rencana aksi kinerja ini menyajikan program, kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, serta memuat pembagian target per triwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamatkan kepada setiap Instansi Pemerintah wajib untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rencana Aksi dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LaKIP) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam membuat dokumen rencana aksi haruslah didasari oleh Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perjanjian Kepala Satuan Kerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II. Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta

4. Tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur negara.

Dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi tidak terlepas dari Rencana Aksi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026, Rencana Aksi Balai Pelaksan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II Tahun 2026. Sehingga dalam pelaksanaan kinerja akan mungkin terjadi perubahan-perubahan pelaksanaan mengingat penyusaian dengan Rencana Aksi Instansi diatasnya.

Penyusunan Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan oleh Direktorat Kawasan Permukiman. Dengan demikian diharapkan rencana aksi kinerja tahun 2025 menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan aktivitasnya.

Medan, Maret 2026

**Kepala Satuan Kerja Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Utara**



MUHAMMAD RIDWAN, S.T., M.T.

NIP. 19790916 200911 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Visi dan Misi	7
1.4 Tujuan dan Sasaran	9
1.5 Program dan Kegiatan	15
BAB 2.....	17
PENETAPAN KINERJA	17
1.1 Sasaran Program / Kegiatan	17
1.2 Metode Pengukuran.....	19
BAB 3.....	20
KAPASITAS ORGANISASI	20
3.1 Sumber Daya Manusia.	20
3.2 Sarana Prasarana.....	20
3.3 DIPA.....	21
BAB 4.....	23
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERBULAN.....	23
4.1 Target Pencapaian Indikator Kinerja Program / Kegiatan	23
4.2 RencanaTarget Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan.....	25
BAB 5.....	36
PENUTUP	36
LAMPIRAN.....	37

BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Aksi merupakan program yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada masing-masing unit organisasi dan unit kerja untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Dokumen Rencana Aksi berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi sebagaimana yang juga diamanatkan dalam instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bahwa masing-masing unit organisasi maupun unit kerja menetapkan Perjanjian Kinerja dengan atasan langsung secara berjenjang. Dalam rangka pencapaian misi bidang perumahan yang tertuang dalam Renstra Kementerian yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Aksi yang dipergunakan sebagai tolak ukur dalam capaian sasaran yang ingin dicapai. Rencana Aksi menjelaskan kualitas suatu perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurang waktu 1 (satu) tahun dimana dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja (PK).

1.2 Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian, dibentuk 6 (enam) unit kerja eselon I dan didukung oleh balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja eselon I Kementerian berada pada tabel berikut:

No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
1.	Sekretariat Jenderal	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian	a. Koordinasi kegiatan Kementerian; b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian; c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian; d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2.	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman	a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan teknik perumahan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan

No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
			perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
3.	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perdesaan	a. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian,

No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
			penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4.	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perkotaan	a. Perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan

No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
			peningkatan kualitas perumahan di perkotaan; c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
5.	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan

No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
			korupsi dalam penyelenggaraan dan kawasan permukiman; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; d. Pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan perumahan; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.
6.	Inspektorat Jenderal	Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian	a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

No.	Nomenklatur Unit Kerja Eselon I	Tugas	Fungsi
			c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Kementerian; e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Visi dan Misi

Setiap instansi pemerintah memiliki visi misi masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing pula.

1.3.1 Visi

Berdasarkan visi Presiden tahun 2025–2029 tersebut, maka Kementerian menyelaraskan visi kementerian dengan visi tersebut dan menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan, serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan untuk mendukung visi Presiden periode 2025–2029 yang dapat diartikan bahwa pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Adapun Visi Presiden adalah sebagai berikut : **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**

1.3.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden **"Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**, Presiden memiliki misi yaitu delapan Asta Cita dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan delapan Asta Cita tersebut dan amanat RPJMN Tahun 2025–2029, Kementerian menjadi penyokong utama Asta Cita 6, yaitu **"Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan"** yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025–2029. Selain menyokong Asta Cita Nomor 6 menjadi Misi Kementerian, Kementerian juga mendukung terlaksananya Asta Cita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan.

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan visi Presiden tahun 2025–2029 tersebut, maka Kementerian menyelaraskan visi kementerian dengan visi tersebut dan menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan, serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan untuk mendukung visi Presiden periode 2025–2029 yang dapat diartikan bahwa pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Adapun Visi Presiden adalah sebagai berikut : **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden **"Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**, Presiden memiliki misi yaitu delapan Asta Cita dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

- d. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan delapan Asta Cita tersebut dan amanat RPJMN Tahun 2025–2029, Kementerian menjadi penyokong utama Asta Cita 6, yaitu **“Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan”** yang kemudian diselaraskan menjadi misi Kementerian periode 2025–2029. Selain menyokong Asta Cita Nomor 6 menjadi Misi Kementerian, Kementerian juga mendukung terlaksananya Asta Cita 3 dan 8 dalam pelaksanaan kebijakan.

Perumusan tujuan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada visi misi Presiden dan Tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian di Daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara, Adapun tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Pertama adalah **“Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”**, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 2. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 3. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 4. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 5. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 6. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 7. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 8. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
 9. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni; dan
 10. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
- b. Tujuan kedua adalah **"Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman"**, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.4.2 Sasaran Progam Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Adapun Sasaran Strategis Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara TA 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Hunian Layak.

2. Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh.
3. Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
4. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen.

Sedangkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2029 khususnya di Provinsi Sumatera Utara memiliki target yang dapat dilihat dalam table 1.2.1 :

Tabel 1.2.1 Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara TA 2025 - 2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan								
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:								
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi							
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak								
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi								
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II								
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR				SATUAN		TARGET					
										2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1				2				3		4	5	6	7	8	9
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II															
OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit				50	823	823	823	823	823	3.343	
		2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit				-	333	333	333	333	333	1.333	
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni															
OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit				1.107	8.069	8.069	8.069	8.069	8.069	33.383	
		2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit				-	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223	4.892	
		3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit				120	396	440	440	440	440	1.836	
		6	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh (Satker)	Laporan				1	-	-	-	-	-	1	
		10	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan				2	-	-	-	-	-	2	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan															
OUTPUT KEGIATAN:															
		1	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan perdesaan	Laporan				-	1	1	1	1	1	4	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1			2	3	4	5	6	7	8	9
		2	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
2			Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu							
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh										
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu										
OUTPUT KEGIATAN:										
		1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	-	17	-	20	-	37
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN										
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman										
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
1			Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman							
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II										
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II										
OUTPUT KEGIATAN:										
		1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
		2	Jumlah Layanan Umum Kawasan Permukiman	Layanan	-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	Jumlah Layanan Umum Perumahan Perdesaan	Layanan	1	1	1	1	4
	4	Jumlah Layanan Umum Perumahan Perkotaan	Layanan	-	1	1	1	4
	5	Jumlah Layanan Umum Sekjen	Layanan	1	1	1	1	5
	6	Jumlah Layanan Sarana Internal	Layanan	1	1	1	1	5
	12	Layanan Revormasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	4

1.5 Program dan Kegiatan

Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan bidang penyediaan perumahan di atas, Program Pengembangan Perumahan termasuk dalam Program Teknis, yaitu merupakan Program- program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), memiliki target-target kinerja yang meliputi kegiatan-kegiatan :

- Rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kawasan Permukiman;
- Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh;
- Rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman;
- Rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan;
- Rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan;
- Rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan.

**STRUKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN UNIT KERJA SATUAN KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN 2025 – 2029**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	UNIT KERJA
1	2	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
I	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
II	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	
2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Direktorat Jenderal Perdesaan
4	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Direktorat Jenderal Perkotaan
II	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas	
5	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
6	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Direktorat Jenderal Perkotaan
7	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Direktorat Jenderal Perdesaan
III	Jumlah rumah susun yang terbangun	
8	Jumlah rumah susun yang terbangun di Perumahan Perkotaan	Direktorat Jenderal Perkotaan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
9	Jumlah Layanan Perkantoran	Sekretariat Jenderal
10	Jumlah Layanan Umum	Sekretariat Jenderal
11	Jumlah Layanan Sarana Internal	Sekretariat Jenderal

BAB 2 PENETAPAN KINERJA

1.1 Sasaran Program / Kegiatan

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 4 DIPA dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan DIPA 2026 dapat dilihat pada table 2.1.

Tabel 2.1 Tabel Perjanjian Kinerja Sesuai dengan DIPA Revisi ke 01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara DIPA Sekretariat Jenderal TA 2026.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan
		2	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		3	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit

Tabel 2.2 Tabel Perjanjian Kinerja Sesuai dengan DIPA Revisi ke 04 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman TA 2026.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	700 Unit
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	2.400 Unit
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

Tabel 2.3 Tabel Perjanjian Kinerja Sesuai dengan DIPA Revisi Ke 02 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara DIPA Direktorat Jenderal Perdesaan TA 2026.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di wilayah perdesaan	1	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	540 Unit
		2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	5.100 Unit
	Program Dukungan Manajemen			
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
		2	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

Tabel 2.4 Tabel Perjanjian Kinerja Sesuai dengan DIPA Revisi ke 02 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara DIPA Direktorat Jenderal Perkotaan TA 2026.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	2.400 Unit
	Program Dukungan Manajemen			
2	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam	1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			
3	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

1.2 Metode Pengukuran

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi & misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan

Metode pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

1. Membandingkan realisasi dengan target yang terdapat pada Perjanjian Kinerja
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Adapun rumusan dalam melakukan pengukuran dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut:

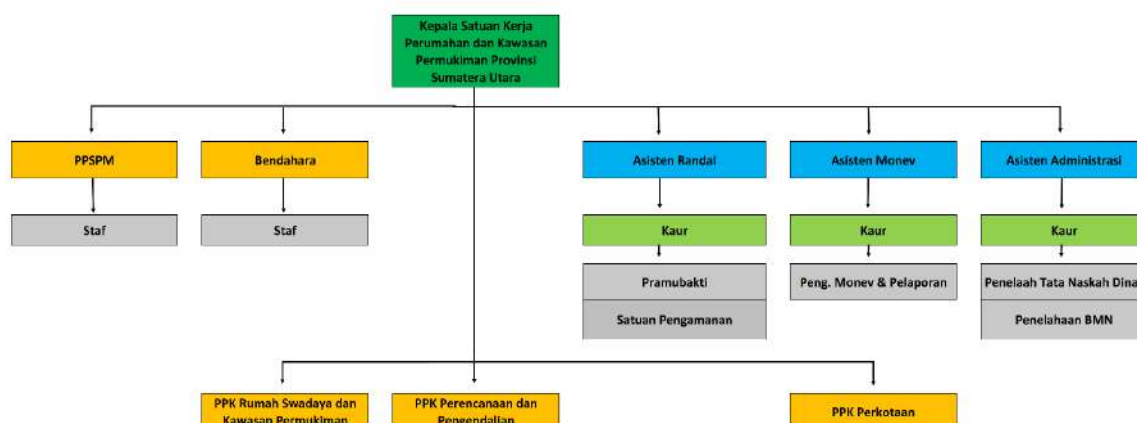
$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

Tabel III.1. Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara



3.2 Sarana Prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2024 dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan yaitu antara lain sebagai berikut:

Tabel III.2. Sarana Prasarana Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2026

KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)
32111	PERALATAN DAN MESIN	Buah	101	426.026.231
3.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	Buah	1	6.000.000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	5	6.370.925
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	5	7.459.850
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	1	6.690.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	15.722.854

KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)
32111	PERALATAN DAN MESIN	Buah	101	426.026.231
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	20	16.608.100
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	20	12.851.000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	1	10.000.000
3.05.02.06.046	Handy Cam	Buah	2	9.000.000
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	1	19.500.000
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	1	1.638.342
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	1	2.500.000
3.09.02.01.011	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	Buah	1	32.700.000
3.09.04.04.004	Digital Camera	Buah	1	4.800.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	10	98.260.490
3.10.01.02.002	LapTop	Buah	11	121.140.880
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	1	12.000.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	14	30.083.790
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	Buah	1	1.200.000
3.15.04.06.019	GPS Survey	Buah	2	11.500.000

3.3 DIPA

Pada tahun 2026, anggaran yang terdapat 4 DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Revisi Ke 01 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor : SP DIPA-146.01.1.691382/2026 sebesar Rp. 382.110.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).
2. DIPA Revisi Ke 04 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor : SP DIPA-146.03.1.691436/2026 sebesar

Rp.56.493.752.000,- (Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

3. DIPA Revisi ke 02 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor : SP DIPA-146.04.1.691490/2026 sebesar Rp. 131.004.490.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
4. DIPA Revisi ke 02 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor : SP DIPA-146.05.1.691544/2026 sebesar Rp. 52.572.900.000,- (Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Dari keempat DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan total sebesar Rp. 240.453.252.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

BAB 4
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERBULAN

4.1 Target Pencapaian Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Tabel 4.1.1 Target Pencapaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal

KERTAS KERJA SATKER
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TA 2026
SEKRETARIAT JENDERAL

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
691382	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara			382.110.000
WA	Program Dukungan Manajemen			382.110.000
7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			382.110.000
7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	2		348.878.000
7665.EBA.962	Layanan Umum	1		20.953.000
7665.EBA.994	Layanan Perkantoran	1		327.925.000
7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	1		33.232.000
7665.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1		33.232.000

Tabel 4.1.2 Target Pencapaian Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

KERTAS KERJA SATKER
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TA 2026
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
691436	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara			56.493.752.000
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			56.441.110.000
7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			56.441.110.000
7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	2470		56.441.110.000
7659.RBB.001	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	70		3.504.960.000
7659.RBB.001.100	Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU Kawasan Permukiman			154.485.000
7659.RBB.001.102	Pembangunan PSU Lingkungan Hunian			3.092.475.000
7659.RBB.001.108	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU			258.000.000
7659.RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	2400		52.936.150.000
7659.RBB.008.100	Pelaksanaan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman			48.000.000.000
7659.RBB.008.101	Pengawasan dan Pengendalian Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman			4.936.150.000
WA	Program Dukungan Manajemen			52.642.000
7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			52.642.000
7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	1		52.642.000

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
7674.EBA.962	Layanan Umum	1		52.642.000
7674.EBA.962.102	Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada 35 Satker Provinsi			52.642.000

Tabel 4.1.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perdesaan

KERTAS KERJA SATKER
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TA 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERDESAAN

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
691490	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara			131.004.490.000
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			130.979.806.000
7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			130.979.806.000
7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	1		114.340.000
7660.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1		114.340.000
7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	5640		130.865.466.000
7660.RBB.005	Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	540		19.886.600.000
7660.RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	5100		110.978.866.000
WA	Program Dukungan Manajemen			24.684.000
7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			24.684.000
7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	1		24.684.000
7675.EBA.962	Layanan Umum	1		24.684.000

Tabel 4.1.4 Target Pencapaian Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkotaan

KERTAS KERJA SATKER
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TA 2026
DIREKTORAT JENDERAL PERKOTAAN

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
691544	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara			52.572.900.000
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			52.558.100.000
7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			52.558.100.000
7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	1		28.920.000
7661.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1		28.920.000
7661.FAE.001.102	Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			28.920.000
7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman (unit, Hektar) [PN]	2400		52.529.180.000
7661.RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	2400		52.529.180.000

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
7661.RBB.008.100	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan			48.000.000.000
7661.RBB.008.101	Pengawasan Pengendalian Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan			4.529.180.000
WA	Program Dukungan Manajemen			14.800.000
7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			14.800.000
7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	1		14.800.000
7676.EBA.962	Layanan Umum	1		14.800.000
7676.EBA.962.107	Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan			14.800.000

4.2 Rencana Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses tersebut dimaksudkan untuk menilai sejauh mana pencapaian setiap indikator kinerja guna memberi gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dibawah ini disajikan data tingkat pencapaian kegiatan terhadap target yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK). Pengukuran kinerja kegiatan (PKK) secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran-III, Form PKK**. Adapun selanjutnya akan dijabarkan secara detail, output kegiatan dari Program Pengembangan Perumahan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun Anggaran 2025.

4.2.1 Rencana Target Pencapaian Keuangan Kegiatan Per Bulan TA 2026 Sekretariat Jenderal

RENCANA KEUANGAN PER KEGIATAN TA 2026 PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA Sekretariat Jenderal

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Keuangan Per Bulan											
											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	LAYANAN UMUM	SUMATERA UTARA	1 Laporan	AU	S	Swakelola	20.953.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	5,6	17,58	30,25	41,12	51,26	61,25	70,33	81,69	92,58	100
2	OPERASIONAL, PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR	SUMATERA UTARA	1 Laporan	AU	S	Swakelola	167.565.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	2,36	30,25	39,65	47,88	56,58	64,55	71,58	81,25	90,11	100
3	LANGGANAN DAYA DAN JASA	SUMATERA UTARA	1 Layanan	AU	S	Swakelola	72.000.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	30,25	40,11	54,66	64,22	72,65	81,22	90,33	96,44	100
4	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	SUMATERA UTARA	1 Layanan	AU	S	Swakelola	33.040.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	28,69	43,58	53,44	67,86	76,77	83,58	91,25	100	100
5	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	SUMATERA UTARA	1 Laporan	AU	AU	AU	55.320.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	28,44	39,65	48,11	56,22	64,55	73,23	82,21	89,59	100
6	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	1 Laporan	AU	AU	AU	14.872.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	28,44	39,65	48,11	56,22	64,55	73,23	82,21	89,59	100
7	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	1 Laporan	AU	AU	AU	18.360.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	28,44	39,65	48,11	56,22	64,55	73,23	82,21	89,59	100

RENCANA FISIK PER KEGIATAN TA 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Sekretariat Jenderal

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan											
											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	LAYANAN UMUM	SUMATERA UTARA	1 Laporan	AU	S	Swakelola	20.953.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	9,85	19,88	31,58	42,55	52,33	63,89	74,62	85,78	95,96	100
2	OPERASIONAL, PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR	SUMATERA UTARA	1 Laporan	AU	S	Swakelola	167.565.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	3,21	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	100
3	LANGGANAN DAYA DAN JASA	SUMATERA UTARA	1 Layanan	AU	S	Swakelola	72.000.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	33,32	41,65	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	98,69	100
4	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	SUMATERA UTARA	1 Layanan	AU	S	Swakelola	33.040.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	30,3	48,69	56,89	69,89	79,58	86,98	93,58	100	100
5	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	SUMATERA UTARA	1 Laporan	AU	AU	AU	55.320.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	100
6	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	1 Laporan	AU	AU	AU	14.872.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	100
7	Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	1 Laporan	AU	AU	AU	18.360.000	0	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	100
	TOTAL						382.110.000	0			0,00	0,00	1,95	32,32	41,71	51,74	60,55	69,18	77,56	85,91	93,92	100,00

Tabel 4.2.2 Rencana Target Pencapaian Keuangan Kegiatan Per Bulan TA 2026 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

**RENCANA KEUANGAN PER KEGIATAN TA 2026
PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman**

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Keuangan Per Bulan											
											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU Kawasan Permukiman	SUMATERA UTARA	70 Unit	Jasa Konsultansi	S	Swakelola	154.485.000	154.485.000	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	0	25	100	100	100	100	100	100	100
2	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	52.642.000	52.642.000	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,3	91,63	100
3	Pembangunan PSU pada Perumahan Lingkungan Hunian di Provinsi Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	70 Unit	Pekerjaan Konstruksi	K	E-purchasing	3.092.475.000	3.092.475.000	30/06/2025	31/12/2025	0	0	0	0	0	8	22	42,3	72,36	95,36	100	100
4	Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Rumah Lingkungan Hunian di Provinsi Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	258.000.000	258.000.000	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	1,2	7,6	16,89	24,56	34,52	53,69	76,59	83,56	100
5	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	2400 Unit	Pekerjaan Konstruksi	S	Swakelola	48.000.000.000	48.000.000.000	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	0	0	5,6	15,36	25,78	38,96	68,78	80,21	100
6	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	4.936.150.000	4.936.150.000	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	0	7,6	17,69	24,36	33,26	55,36	73,69	85,47	100
TOTAL							56.493.752.000	56.493.752.000			0,00	0,00	0,00	0,04	0,81	7,14	16,82	27,62	42,49	70,80	81,83	100,00

RENCANA FISIK PER KEGIATAN TA 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaa	Metod e	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan											
											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU Kawasan Permukiman	SUMATERA UTARA	70 Unit	Jasa Konsultansi	S	Swakel ola	154.485.000	154.485.000	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	0	25	100	100	100	100	100	100	100
2	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakel ola	52.642.000	52.642.000	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,3	91,63	100
3	Pembangunan PSU pada Perumahan Lingkungan Hunian di Provinsi Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	70 Unit	Pekerjaan Konstruksi	K	E-purchasing	3.092.475.000	3.092.475.000	30/06/2025	31/12/2025	0	0	0	0	0	10	25	45	75	100	100	100
4	Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Rumah Lingkungan Hunian di Provinsi Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakel ola	258.000.000	258.000.000	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	2	8,3	18	26	35	56	78	86	100
5	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	2400 Unit	Pekerjaan Konstruksi	S	Swakel ola	48.000.000.000	48.000.000.000	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	0	0	3	12	20	35	65	75	100
6	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakel ola	4.936.150.000	4.936.150.000	02/01/2025	31/12/2025	0	0	0	0	8,3	18	26	35	56	78	86	100
TOTAL							56.493.752.000	56.493.752.000			0,00	0,00	0,00	0,04	0,87	5,07	14,28	23,01	39,34	68,22	77,46	100

Tabel 4.2.3 Rencana Target Pencapaian Keuangan Kegiatan Per Bulan TA 2026 Direktorat Jenderal Perdesaan

**RENCANA KEUANGAN PER KEGIATAN TA 2026
PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Direktorat Jenderal Perdesaan**

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Keuangan Per Bulan											
											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pemantauan dan Evaluasi	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	114.340.000	114.340.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	1,20	5,30	15,20	32,25	46,89	58,59	65,23	75,98	85,96	100,00
2	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	SUMATERA UTARA	1 Laporan	AU	AU	AU	24.684.000	24.684.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	100,00
3	Penyediaan Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana	SUMATERA UTARA	540 Unit	Pekerjaan Konstruksi	K	E-purchasing	19.686.600.000	19.686.600.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	28,69	42,39	52,39	61,28	70,12	81,23	100,00
4	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UNTUK MITIGASI BENCANA	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	200.000.000	200.000.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	8,90	30,20	45,20	55,69	63,25	73,69	100,00
5	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERDESAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	5100 Unit	Pekerjaan Konstruksi	S	Swakelola	102.000.000.000	102.000.000.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	2,30	9,10	31,21	46,23	57,89	65,78	75,96	98,78	100,00
6	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA	SUMATERA UTARA	5100 Unit	Pekerjaan Konstruksi	S	Swakelola	8.978.866.000	8.978.866.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	1,20	4,10	12,30	30,25	43,56	55,69	62,21	73,21	83,21	100,00
	TOTAL						131.004.490.000	131.004.490.000			0,00	0,00	0,08	2,08	9,25	30,74	45,45	56,90	64,84	74,88	95,02	100,00

RENCANA FISIK PER KEGIATAN TA 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Direktorat Jenderal Perdesaan

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan											
											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pemantauan dan Evaluasi	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	114.340.000	114.340.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	2,10	5,30	15,20	32,25	46,89	58,59	65,23	75,98	85,96	100,00
2	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	SUMATERA UTARA	1 Laporan	AU	AU	AU	24.684.000	24.684.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	100,00
3	Penyediaan Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana	SUMATERA UTARA	540 Unit	Pekerjaan Konstruksi	K	E-purchasing	19.686.600.000	19.686.600.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	30,20	45,20	55,69	63,25	73,69	83,21	100,00
4	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UNTUK MITIGASI BENCANA	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	200.000.000	200.000.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	8,90	30,20	45,20	55,69	63,25	73,69	100,00
5	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERDESAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	5100 Unit	Pekerjaan Konstruksi	S	Swakelola	102.000.000.000	102.000.000.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	2,30	8,90	30,20	45,20	55,69	63,25	73,69	83,21	100,00
6	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA	SUMATERA UTARA	5100 Unit	Pekerjaan Konstruksi	S	Swakelola	8.978.866.000	8.978.866.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	2,10	5,30	15,20	32,25	46,89	58,59	65,23	75,98	85,96	100,00
TOTAL							131.004.490.000	131.004.490.000			0,00	0,00	0,15	2,16	9,33	30,31	45,30	55,88	63,38	73,83	83,39	100,00

Tabel 4.2.2 Rencana Target Pencapaian Keuangan Kegiatan Per Bulan TA 2026 Direktorat Jenderal Perkotaan

**RENCANA KEUANGAN PER KEGIATAN TA 2026
PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Direktorat Jenderal Perkotaan**

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Keuangan Per Bulan											
											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Satker PP	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	28.920.000	28.920.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	100,00
2	Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan kawasan pemukiman sumatera utara	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	14.800.000	14.800.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	100,00
3	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	2400 Unit	Jasa Lainnya	S	Swakelola	48.000.000.000	48.000.000.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	13,88	30,59	50,89	60,78	86,96	98,89	100,00
4	PENGAWASAN PENGENDALIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	4.529.180.000	4.529.180.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	12,56	25,56	45,69	55,69	80,59	86,95	100,00
TOTAL							52.572.900.000	52.572.900.000			0,00	0,00	0,00	0,03	2,33	13,80	30,18	50,46	60,35	86,41	97,86	100,00

RENCANA FISIK PER KEGIATAN TA 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Direktorat Jenderal Perkotaan

No.	Nama Paket	Lokasi	Output	Jenis	Jenis Pengadaan	Metode	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RAKAL (Rp.)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Rencana Fisik Per Bulan											
											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Satker PP	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	28.920.000	28.920.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	100,00
2	Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan kawasan pemukiman sumatera utara	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	14.800.000	14.800.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	33,32	41,65	49,98	58,31	66,64	74,97	83,33	91,63	100,00
3	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	2400 Unit	Jasa Lainnya	S	Swakelola	48.000.000.000	48.000.000.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	12,56	25,56	45,69	55,69	73,89	86,95	100,00
4	PENGAWASAN PENGENDALIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	1 Laporan	Jasa Lainnya	S	Swakelola	4.529.180.000	4.529.180.000	02/01/2025	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	12,56	25,56	45,69	55,69	73,89	86,95	100,00
TOTAL							52.572.900.000	52.572.900.000			0,00	0,00	0,00	0,03	2,33	12,59	25,59	45,71	55,71	73,90	86,95	100,00

Tabel 4.2.3 Rencana Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Terhadap Perjanjian Kinerja TA 2026.

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN		%
			RENCANA	TARGET	
1	2				
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
I	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman				
1	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	700	700	100
II	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman				
1	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	2.400	2.400	100
IV	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di wilayah perdesaan				
1	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	540	540	100
2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	5.100	5.100	100
VI	Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Perkotaan				
1	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	2.400	2.400	100
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
I	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal				
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100
2	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	100
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100
II	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	100
III	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di wilayah perdesaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	100
2	Jumlah Layanan Umum	Laporan	1	1	100
IV	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam				
1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100

Adapun kriteria interpretasi terhadap aspek evaluasi adalah sebagai berikut:

No	Nilai Angka	Inteprestasi
1	90% > nilai	Sangat Baik
2	80% > nilai = 90%	Baik
3	60% > nilai = 80%	Cukup atau Normal
4	50% > nilai = 60%	Kurang
5	50%	Sangat Kurang

BAB 5

PENUTUP

Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 disusun agar pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan lancar, akuntabel dan tepat sasaran.

Dalam mencapai sasaran sesuai dengan Rencana Aksi dibutuhkan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat diharapkan dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam rangka proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan rakyat sangat diperlukan.

Rencana Aksi merupakan salah satu tolak ukur kinerja suatu instansi pada tahun berjalan, sehingga diharapkan dengan adanya Rencana Aksi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 ini dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan capaian serta target yang akan dicapai.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Ridwan**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Wahyu Adi Satriawan
NIP. 1981512 2010121001

Medan, 30 Maret 2026

Pihak Pertama

Muhammad Ridwan
NIP. 19790916 2009111002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1 Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

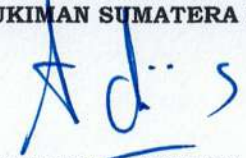
PAGU APBN

- 1 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Rp	52.642.000,00
Rp	52.642.000,00

Medan, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II


WAHYU ADI SATRIAWAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA


MUHAMMAD RIDWAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Ridwan**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Wahyu Adi Satriawan
NIP. 1981512 2010121001

Medan, 30 Maret 2026

Pihak Pertama

Muhammad Ridwan
NIP. 19790916 2009111002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	70 Unit
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	2.400 Unit
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

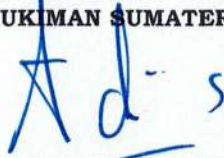
PAGU APBN

- 1 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Rp 56.493.752.000,00
 Rp 56.493.752.000,00

Medan, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN SUMATERA II


 WAHYU ADI SATRIAWAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA


 MUHAMMAD RIDWAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Ridwan**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Wahyu Adi Satriawan
NIP. 1981512 2010121001

Medan, 30 Maret 2026

Pihak Pertama

Muhammad Ridwan
NIP. 19790916 2009111002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

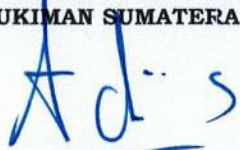
- 1 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

PAGU APBN

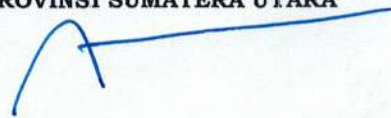
Rp	52.006.000,00
Rp	52.006.000,00

Medan, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN SUMATERA II


 WAHYU ADI SATRIAWAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA


 MUHAMMAD RIDWAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Ridwan**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Wahyu Adi Satriawan
NIP. 1981512 2010121001

Medan, 30 Maret 2026

Pihak Pertama

Muhammad Ridwan
NIP. 19790916 2009111002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di wilayah perdesaan	1	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	540 Unit
		2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	5.100 Unit
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

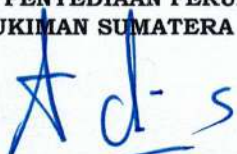
- 1 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

PAGU APBN

Rp	131.004.490.000,00
Rp	131.004.490.000,00

Medan, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II


WAHYU ADI SATRIAWAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA


MUHAMMAD RIDWAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Ridwan**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Wahyu Adi Satriawan

NIP. 1981512 2010121001

Medan, 30 Maret 2026

Pihak Pertama

Muhammad Ridwan

NIP. 19790916 2009111002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

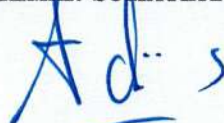
- 1 **Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara**

PAGU APBN

Rp	56.720.000,00
Rp	56.720.000,00

Medan, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II



WAHYU ADI SATRIAWAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



MUHAMMAD RIDWAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Ridwan**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Wahyu Adi Satriawan

NIP. 1981512 2010121001

Medan, 30 Maret 2026

Pihak Pertama

Muhammad Ridwan

NIP. 19790916 2009111002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	2.400 Unit
Program Dukungan Manajemen				
2	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
3	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan

KEGIATAN

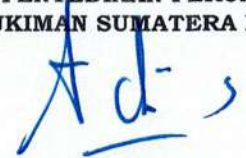
- 1 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

PAGU APBN

Rp	52.572.900.000,00
Rp	52.572.900.000,00

Medan, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II


WAHYU ADI SATRIAWAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PROVINSI SUMATERA UTARA


MUHAMMAD RIDWAN



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Ridwan**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Wahyu Adi Satriawan**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Wahyu Adi Satriawan
NIP. 1981512 2010121001

Medan, 30 Maret 2026

Pihak Pertama

Muhammad Ridwan
NIP. 19790916 2009111002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT JENDRAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1	Jumlah Layanan Umum.	1 Layanan
		2	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		3	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit

KEGIATAN

- 1 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

PAGU APBN

Rp	382.110.000,00
Rp	382.110.000,00

Medan, 30 Maret 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN SUMATERA II

Adis

WAHYU ADI SATRIAWAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA

[Signature]

MUHAMMAD RIDWAN